



Sekolah Perlu Juknis Resmi Disdik

Kemendikbud Alokasikan Bantuan Kuota 35GB/Bulan Pada Siswa

YOGYA. TRIBUN - Sejumlah sekolah di DIY menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan ke depan, yakni September-Desember 2020.

Pihak sekolah pun menyambut gembira kebijakan tersebut. Namun, ada beberapa keluhan sekolah terkait teknis mekanisme penyaluran. Dikutip dari *kompas.com*, rencananya siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru mendapat 42 GB/bulan, sedangkan mahasiswa dan dosen masing-masing mendapat 50 GB/bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi.

"Kami sih senang-senang saja. Tapi tenggat pengumpulan data nomor HP siswa terlalu mendadak," ujar Bendahara Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMAN 11 Yogyakarta, Agustin Susilowati saat dihubungi *Tribun Jogja*, Jumat (28/8).

Agustin menjelaskan, Kemendikbud akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai basis data penyaluran bantuan kuota tersebut. Pihak sekolah pun diminta untuk meng-update nomor HP seluruh siswa dan guru hingga batas akhir 31 Agustus 2020.

"Maksimal pendataan tanggal 31. Padahal kami perlu mengumpulkan sekian ratus nomor, siswa. Walaupun kami sudah punya data dari penyaluran BOS yang lalu, tapi ada siswa yang nomornya hangus, atau provider Telkomsel kan enggak bisa diisi kuota," tuturnya.

Ia menyampaikan pihak sekolah baru mendapat surat edaran Kemendikbud dari grup WhatsApp Dapodik. Surat edaran diberikan pada Kamis (27/8). "Kalau nomor HP guru rata-rata sudah enggak ganti. Kalau siswa kan beda. Padahal itu rencananya untuk 4 bulan. Besarannya kami belum tahu," ungkapnya.

Agustin menambahkan,

selama ini SMAN 11 Yogyakarta telah menyalurkan bantuan kuota kepada siswa dan guru yang bersumber dari pengalihan dana BOS. Bantuan tersebut telah disalurkan pada Mei dan awal Agustus, menyusul selanjutnya September mendatang.

"Besarnya kami buat sama untuk siswa dan guru. Mei kemarin sekitar Rp80-100 ribu tergantung provider-nya, untuk Agustus dan September ini masing-masing sekitaran Rp50 ribu. Selama Agustus dan September ini total anggaran (untuk bantuan kuota) sekitar Rp100-an juta," bebernya.

Kepala SMPN 9 Kota Yogyakarta, Sugharjo, menyambut baik rencana ini. "Bagus, luar biasa. Ini bentuk perhatian pemerintah yang luar biasa. Dengan semua laporan dan data yang masuk ke pemerintah (terkait kesulitan PJJ) wajar ini sebagai bentuk respons yang bagus," ujar Sugharjo.

Ia menerangkan, saat ini pihaknya akan segera mendata nomor HP terbaru setiap siswa dan guru sesuai perintah dalam surat edaran Kemendikbud tertanggal 27 Agus-

tus 2020. Namun, Sugharjo mengaku dibutuhkan petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Pendidikan (Disdik) agar sekolah tidak salah langkah.

"Tapi juga perlu mendapat petunjuk dari Dinas Pendidikan agar kami tidak salah langkah. Juknis diperlukan sebagai dasar hukum. Kalau enggak ada dasar hukumnya nanti ragu-ragu," tuturnya.

Selain itu, Sugharjo beranggapan batas waktu yang diberikan Kemendikbud untuk mendata nomor HP siswa dan guru terlalu cepat, yakni hanya 4 hari hingga 31 Agustus 2020 sejak surat edaran dikeluarkan. Sementara, ada ratusan siswa yang perlu ditanyai.

Tunggu arahan

Kepala Disdik Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asroni menyebut perlunya adanya juknis sebagai dasar hukum kebijakan tersebut. "Iya lah harus ada dasar hukum. Yang mengatur pusat. Belum tahu secara teknis akan bagaimana. Di surat (edaran) itu sekolah diminta untuk meng-update data melalui Dapodik (data pokok pendidikan) termasuk nomor HP siswa," ungkapnya. (uti)

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005